

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik kepartaian merupakan fenomena umum dalam kehidupan berdemokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya partai politik. Partai politik (Parpol) sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi serta mengaitkannya dengan aksi politik yang lebih luas di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional.<sup>1</sup>

Partai politik berperan besar baik dalam proses seleksi baik pejabat publik maupun dalam penetapan substansi kebijakan.<sup>2</sup> Adapun pengertian tentang partai politik yang dikemukakan oleh Edmund Burke yang di kutip oleh Cheppy Haricahyono, bahwa partai politik ialah *“A group of men who had agreed upon a principle by which the national interest might be served”*.<sup>3</sup> Partai politik merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, harus dimengerti bahwa partisipasi

<sup>1</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm. 403.

<sup>2</sup> Robert Morrison Maciver, *The Modern State*, First Edition, Oxford University Press, London: 1955, hlm. 194. *Jurnal Konstitusi*, Vol 3, No 4, Desember 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 7

<sup>3</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Tiara Wacana, Yogyakarta: 1986, hlm. 219.

politik yang berdaulat hanya dapat tersalurkan melalui pemungutan suara pada saat Pemilu, untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap cukup efektif dengan maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, di dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik memiliki posisi yang dominan.<sup>4</sup>

Parpol dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah dalam menyeleksi kader-kader berpotensi untuk menjadi pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader tersebut, ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh dewan perwakilan rakyat. Tentu, tidak semua jabatan dapat diisi oleh partai sebagai sarana rekrutmen politik.

Jabatan-jabatan profesional di bidang kepegawaian dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*political appointment*), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula. Pemilihan umum menjadi wahana pertarungan partai untuk mendapatkan jabatan publik tersebut.

Di negara yang tidak memiliki partai politik dapat disebut sebagai negara yang tidak memiliki sarana kelembagaan dalam suksesi kepemimpinan guna mendorong perubahan yang terus-menerus dan menyerap segala gejala perubahan

---

<sup>4</sup> Lihat Dawn Oliver, *Constitutional Reform in the UK*, London: Oxford University Press, London: 2003, hlm. 35. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 8

yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi.

Parpol memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokratis.<sup>6</sup> Bahkan banyak yang mengatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.<sup>7</sup> Bersamaan dengan semakin berperannya Parpol dalam kehidupan negara yang demokratis, mulai timbul konflik-konflik dalam tubuh Parpol baik itu konflik sosial maupun konflik politik.

Konflik politik yang terjadi dalam Parpol harus disikapi dengan penuh kebijaksanaan, karena bagaimanapun suatu organisasi takkan lepas dari proses dinamika dan konflik.<sup>8</sup> Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri serupa, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik, yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau



<sup>5</sup>Samuel P.Huntington, *Tertib Politik Masyarakat Yang Sedang Berubah*, CV Rajawali, Jakarta: 1983, hlm. 263.

<sup>6</sup>Schattschneider, E.E, *The Semisovereign People: A realist's view of democracy in America*, Illionis: The Dryden Press Hinsdale, 1975. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>7</sup>Bahkan oleh Yves Meny and Andrew Knapp dikatakan “A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”. Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Third Edition Oxford University Press, 1968, hlm. 86. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm.7

<sup>8</sup>Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau benturan kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar antara beberapa kelompok yang saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu serta kelompok dengan pemerintah.

pemerintahan, dan kebijakan.<sup>9</sup>

Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau benturan kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar antara beberapa kelompok yang saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan di antara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan-pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu serta kelompok dengan pemerintah.



Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti bagaimana partai politik mengorganisir dirinya agar terbebas dari ancaman perpecahan, bagaimana hubungan antara partai politik dengan massa pendukungnya, bagaimana peranan ideologi di dalam kehidupan partai untuk memperoleh sarana materil, serta bagaimana peranan partai politik bagi kelancaran perputaran mesin partai.<sup>10</sup>

Konflik internal Parpol, sangat intens terjadi akhir-akhir ini, kecenderungan terjadinya konflik internal Parpol semakin meningkat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Persamaan kehendak dan cita-cita yang menyatukan anggota partai,

---

<sup>9</sup> Unsur-nsur yang dapat dikaji untuk menjelaskan politik di antaranya negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Lihat dalam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 17

<sup>10</sup> Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 408

namun partai politik tidak akan bisa menghindari terjadinya konflik. Konflik internal partai politik disebabkan banyak hal, salah satunya adalah tidak adanya kesamaan kehendak dan cita-cita atau karena anggota partai yang tidak percaya akan kepemimpinan pemimpinnya.<sup>11</sup>

Sudah banyak kajian tentang konflik Politik, di antaranya penelitian Meutya Vidia Hafid (2018), Aisyah Putri Budiatri (2017), Amri Gunawan (2017), Suripto (2016), Gunawan Undang dan Husni Tamrin (2016), Coudry Sitompul (2015), Angela Rianita Puspitaningrum dan Mario Antonius Birowo (2014). Dari penelitian diatas kita bisa memahami bahwasanya kajian akan konflik politik bukanlah kajian yang baru dalam sistem kepartaian di Indonesia. Dalam kajian konflik politik yang diangkat oleh Meutya Vidia Hafid menghasilkan konsensus dari dua belah pihak dengan pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian konflik.

Persoalan konflik yang pernah terjadi baik di dalam Partai Islam (PKB, PPP, PAN, PKS) maupun Partai Nasionalis (GolKar, PDIP, Partai Demokrat). Kasus konflik dan perpecahan partai yang berlangsung selama era reformasi ini terjadi karena berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan pandangan visi-misi partai, perpecahan dukungan pencalonan dalam pemilihan presiden, tidak terakomodasinya usulan di dalam partai, serta pemberian dukungan terhadap calon pemimpin partai dalam suksesi internal Parpol.

---

<sup>11</sup> Beberapa partai yang pernah mengalami konflik seperti yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Era Soeharto, Partai Kebangkitan Bangsa, sampai pada Partai Bintang Reformasi. Kemudian konflik juga dialami oleh Partai Golkar pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016

Sesungguhnya konflik politik yang terjadi dalam sebuah Parpol merupakan sebuah kewajaran dalam proses dinamika,<sup>12</sup> namun kita dapat pula membatasi apakah proses tersebut merupakan konflik atau hanya persaingan saja dengan cara membuat identifikasi mengenai konflik internal Parpol itu sendiri. Fenomena konflik internal Parpol di Indonesia sangat lazim terjadi dan semakin kentara terlihat ketika era pasca reformasi. Berbeda dengan seluruh penelitian di atas, penelitian ini mengangkat isu konflik politik yang terjadi dalam kepengurusan Partai Hanura Sumatera Barat, dengan fokus menganalisis eskalasi konflik politik yang terjadi pada kepengurusan Partai Hanura Sumatera Barat tahun 2018-2020 dengan lokasi penelitian di wilayah DPD Partai Hanura Sumatera Barat

Penulis berasumsi konflik politik yang terjadi di DPD Partai Hanura Sumatera Barat disebabkan oleh

1. Tingginya kepentingan gerbong Marzul Veri dalam merebut kepemimpinan Partai Hanura di Sumatera Barat
2. Tidak adanya tokoh yang mampu menjembatani kedua kubu untuk melaksanakan rekonsiliasi.
3. Tidak adanya bentuk interaksi ataupun forum media di tingkat partai untuk mengakomodasi kepentingan kedua kubu yang berkonflik.

Peneliti juga melihat konflik tidak terjadi proses penurunan tingkat konflik (deeskalasi), kondisi ini peneliti asumsikan karna selama proses konflik terjadi

---

<sup>12</sup> Dinamika merupakan interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Syamsudin, *Dinamika Politik Lokal. Op.Cit.*, hlm. 25

adanya keterlibatan pihak eksternal yang memperuncing suasana.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tarik ulur kepentingan dalam partai seringkali menyebabkan terjadinya konflik internal sebuah Parpol. Peran penting Parpol dalam pemerintahan dewasa ini membuat Parpol juga tidak terlepas dari konflik kepentingan baik secara eksternal maupun secara internal.<sup>13</sup> Di satu sisi konflik ini bisa saja menimbulkan situasi dinamis dalam tubuh Parpol itu sendiri, namun di sisi lain Parpol dapat saja mengalami kemunduran akibat instabilitas dalam tubuh partainya. Konflik internal yang terjadi di beberapa partai besar dalam skala nasional ternyata juga dialami oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Partai ini berdiri tak lepas dari gagasan Jendral Purn Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lainnya. Konflik ini dipicu oleh kebijakan kontroversional yang diterapkan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oesman Sapta Odang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selain menjadi Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus politisi ulung karena juga pernah menjabat menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Tahun 2016 Oesman Sapta Odang di tunjuk secara aklamasi pada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kamis 22 Desember 2016 di kantor

---

<sup>13</sup> Ichlasul Amal., 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Jakarta Tiara Wacana. hlm. 38

dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Hanura,<sup>14</sup> menggantikan posisi Wiranto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Setelah resmi menggantikan posisi Wiranto, Oesman Sapta Odang malah membuat kebijakan untuk mengajak dan memasukkan anggota DPD sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

Kebijakan ini mulai menuai kritikan dari tokoh senior Partai Hanura namun, Oesman Sapta Odang tidak peduli dan tetap menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Setahun lebih berselang atau tepatnya 15 Januari 2018 beberapa pengurus DPP dan DPD Partai Hanura berkumpul lewat rapat pleno.<sup>15</sup> Hasil dari rapat keputusan Rapat Pleno yaitunya melakukan pemecatan terhadap Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum.

Keputusan ini menjadi awal mula perpecahan kepengurusan Hanura di tingkat pusat. Dari kubu Sarifuddin Sudding juga melaksanakan rapat pleno dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Daryatmo untuk menggantikan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Konflik elit antara kubu Oesman Sapta Odang dan kubu Sarifuddin Sudding berimbas panjang sampai ada pemecatan terhadap Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat. Namun setelah itu, pada tanggal 23 Januari 2018 Ketua Dewan Pembina Wiranto memediasi kedua kubu yang sedang



<sup>14</sup>Tempo.com, diakses di <https://nasional.tempo.com>. *Pimpin Hanura, Oesman Sapta Tegaskan Dukung Jokowi Pada Pemilu 2019*, tanggal 05 Januari 2020 pukul 17.24 WIB

<sup>15</sup>Detik.com, diakses di <https://.detik.com>. *Oesman Sapta Resmi Jadi Ketua Umum Hanura*. tanggal 06 Januari 2020 pukul 16.34 WIB.

bersiteru untuk menemukan kata islah.<sup>16</sup>

Wiranto juga mengatakan bahwa kedua belah pihak telah mengakui kebenarannya. Islah<sup>17</sup> yang di mediasi oleh mantan Ketua Umum Partai Hanura yaitunya Wiranto menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya. Pertama mengembalikan struktur kepengurusan partai sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016.<sup>18</sup> Kedua akan membentuk tim untuk mengakomodasi sejumlah nama dalam mengembalikan struktur kepengurusan yang mampu mengakomodir kepentingan kedua kubu.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses islah tersebut tidaklah dilaksanakan oleh kubu Oesman Sapta Odang, ini dibuktikan dengan tetap dipecatnya beberapa pengurus DPD Hanura di tingkat provinsi dan beberapa anggota DPRD baik di tingkat kabupaten atau kota. Ketua DPD Hanura Sumatera Barat tetap diganti dan Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat yang baru malah mendapatkan SK dari Oesman Sapta Odang selaku Ketua umum.



Dalam kepengurusan di DPD Sumatera Barat Versi Oesman Sapta Odang dipimpin oleh Marzul Veri selaku Ketua dan Fauzi Novaldi sebagai Sekretaris yang memiliki sekretariat di jalan Sawahan no 50, Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Sedangkan kepengurusan DPD versi Daryatmo dipimpin oleh

<sup>16</sup>Tribunnews.com, diakses dari <http://kupang.tribunnews.com>, *Wiranto Damaikan Kubu Oesman Sapta dan Daryatmo, Konflik Hanura Selesai*. Tanggal 10 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>17</sup>Islah berarti perdamaian (tentang penyelesaian pertikaian dan sebagainya), diakses dari <https://kbbi.web.id/islah.html>, tanggal 10 Januari 2020 pukul 09.15 WIB.

<sup>18</sup>Detik.com, diakses dari <http://detik.com>, *Islah Terganjil, Hanura 'Abhara' Minta Kubu Oso Setop Pecat Pengurus*, tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.24 WIB.

Muslim Harun dan M. Ikhsan memiliki sekretariat di Jalan Pinus II No 02 Lolong, Kota Padang.

Untuk itu peneliti akan mencoba untuk menjelaskan eskalasi konflik politik dalam kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020 dengan rumusan pertanyaan yaitu

1. Apa penyebab konflik politik di kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat?
2. Bagaimana eskalasi konflik politik pada kepengurusan Partai Hanura Sumatera Barat tahun 2018-2020?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari beberapa hal yaitu

1. Menggambarkan dan memahami faktor-faktor penyebab konflik politik di DPD Partai Hanura Sumatera Barat.
2. Menggambarkan dan memahami eskalasi konflik pada kepengurusan kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat tahun 2018-2020.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian tentang konflik politik ini

dilihat dari dua sisi yaitu:

### **1.3.2.1 Manfaat akademis**

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran tentang perkembangan konsep konflik politik dan faktor-faktor penyebab konflik. Kemudian dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah tentang konflik politik, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Dari segi praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi partai politik dalam meminimalisir penyebab konflik internal sehingga mampu melahirkan solusi-solusi secara maksimal dapat dijadikan sebagai tambahan referensi oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dalam suatu partai politik.

